



## Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang

Robi Eka Putra, Roni Ekha Putera

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

### ARTICLE INFORMATION

Received: January 31, 2022  
 Revised: March 19, 2022  
 Accepted: March 25, 2022  
 Available online: March 27, 2022

### KEYWORDS

Poverty, e-Warong, Padang, Evaluation

### CORRESPONDENCE

Name: Robi Eka Putra  
 E-mail: [robiekaputradarnius@gmail.com](mailto:robiekaputradarnius@gmail.com)

### A B S T R A C T

Poverty is a complex problem experienced by various countries in the world, including Indonesia. The government has launched various poverty alleviation policies in Indonesia, one of which is through the Non-Cash Food Assistance (NCFA) policy with a program called e-Warong. The implementation of e-Warong in Padang City is known to be optimal, but needs to be improved in a few aspects in order to improve the quality of e-Warong to be perfect, so this study aims to evaluate the implementation of e-Warong as a poverty alleviation policy in Padang City. This study uses a qualitative approach with a descriptive method using secondary data sources. The results show that there have been no problems related to the integrity, reputation and credibility of e-Warong in Padang City. The conclusions of this research show that, to improve the quality of e-Warongs that operate in accordance with applicable regulations, close monitoring is required by third parties who are not related to structural positions from the city to the sub-district. monitoring by a private audit team can be a neutral and good addition to improving e-Warong in the city of Padang

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan yang kompleks tidak hanya dipahami sebagai bentuk disabilitas ekonomi, akan tetapi merupakan kegagalan dalam pemenuhan hak dasar manusia sehingga mengakibatkan munculnya gap perlakuan bagi individu maupun kelompoknya dalam hampir setiap aspek kehidupan. Kemiskinan lahir dari ketidakberdayaan individu atau kelompok dalam menjadi pribadi yang sejahtera. Selain itu, kemiskinan dilihat sebagai keadaan kekurangan yang dialami oleh individu, keluarga, atau kelompok masyarakat khususnya dalam hal rendahnya kualitas hidup secara sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, kemiskinan berdampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas, menciptakan beban sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan angka kriminalitas, hingga dapat menurunkan ketertiban umum. (Gustin, 2019; Fadilla, 2017; Septiadi dan Nursan, 2020).

Konsep kemiskinan diuraikan melalui beberapa teori kemiskinan, seperti kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan alamiah (Fadilla, 2017). Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi kondisi kemiskinan yang berkepanjangan, sehingga bukan kondisi kemiskinan bawaan. Kemiskinan struktural diakibatkan karena faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi individu atau kelompok masyarakat miskin. Berbagai hambatan dalam akses sumberdaya ekonomi, lapangan pekerjaan, dan partisipasi dalam pembangunan diakibatkan oleh struktur ekonomi dan politik yang kurang memihak kelompok masyarakat marjinal (Fadilla, 2017; Suyanto, 2005). Sementara itu, kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan bahkan ketiadaan sumberdaya ekonomi, input berbagai faktor produksi berupa

modal, tanah, sumberdaya manusia (seperti kualitas pendidikan), maupun kondisi geografis yang terkait dengan domisili masyarakat (Fadilla, 2017).

Kebijakan yang diusung oleh United Nation (2020) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) meletakkan No Poverty atau Mengakhiri Kemiskinan sebagai program pertamanya. Hal ini dilakukan mengingat kemiskinan menjadi momok terbesar bagi setiap negara di dunia. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan di seluruh dunia. Beberapa target yang ditetapkan untuk program pengentasan kemiskinan antara lain memastikan semua penduduk (terutama penduduk miskin dan rentan) mendapatkan hak setara dalam mengakses sumber ekonomi. Selain itu, ditargetkan juga untuk membangun berbagai fasilitas dan layanan keuangan termasuk lembaga keuangan mikro. Untuk mencapai target tersebut, harus dipastikan terdapat signifikansi mobilisasi sumberdaya dari berbagai sumber; serta menciptakan kerangka kerja dan kebijakan pada level nasional, regional, internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin.

Berbagai negara juga telah menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan PBB. Swinton *et al.* (2003) menyebutkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Amerika Latin diperlukan dalam bentuk intensifikasi pertanian dan diversifikasi lapangan pekerjaan, serta menargetkan pada masalah spesifik lingkungan yang disesuaikan dengan motivasi dari pembuat kebijakan di wilayah pedesaan. Sementara itu, Primayanti *et al.* (2017) dalam temuannya menyebutkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok dalam mencapai tujuan pertama SDGs No Poverty dilaksanakan dengan beberapa bentuk, diantaranya menyiapkan sistem kebijakan yang sehat untuk dan secara aktif mengembangkan kerjasama dengan berbagai sektor;

mengembangkan inklusifitas mekanisme pasar; dan memobilisasi pemerintah, pasar dan masyarakat berkolaborasi untuk memerangi kemiskinan.

Selain itu, [Primayanti et al. \(2017\)](#) juga menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok juga berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang proaktif; mempercepat pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi dan terampil dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja penuh; mempromosikan pekerjaan dan melibatkan perempuan melalui beberapa jaringan; serta menjamin akses yang sama bagi perempuan untuk bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku; dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan memberdayakan lulusan perguruan tinggi. Pemerintah Tiongkok, menurut [Primayanti et al. \(2017\)](#), memantapkan pengentasan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan melalui implementasi program *Development-oriented Poverty Reduction Program for Rural Tiongkok*.

Bantuan luar negeri juga berperan dalam membantu pengentasan kemiskinan di berbagai negara di dunia. [Mahembe dan Odhiambo \(2019\)](#) dan [Arndt et al. \(2015\)](#) mengkaji mengenai efektifitas bantuan luar negeri dalam mereduksi kemiskinan suatu negara. Dalam temuannya, [Mahembe dan Odhiambo \(2019\)](#) menyebutkan bahwa bantuan luar negeri yang ditargetkan untuk dana sosial seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial adalah efektif. Ditambahkan oleh [Arndt et al. \(2015\)](#) bahwa bantuan sosial dari luar negeri tersebut dapat membantu meningkatkan investasi, meningkatkan akses pendidikan, hingga meningkatkan harapan hidup dan kematian bayi. Oleh sebab itu, [Hirano and Otsubo \(2014\)](#) menyimpulkan bahwa bantuan dalam bidang ekonomi berdampak positif bagi pertumbuhan masyarakat miskin, sementara itu bantuan sosial menjadi efektif melalui distribusi yang sistematis.

Sejalan dengan target SDGs oleh PBB untuk mengentaskan kemiskinan, Indonesia sebagai negara yang masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi juga menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sebagai dasar negara, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Demi menjalankan amanat tersebut, Indonesia berusaha mewujudkan kesejahteraan melalui berbagai cara dengan menjalankan aktivitas pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan prioritas pengentasan kemiskinan.

BPS merilis laporan bahwa hingga Maret 2021, angka kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong besar, bahkan mengalami peningkatan sejak tahun 2019. [BPS \(2021\)](#) melaporkan bahwa per September 2019, angka kemiskinan di Indonesia adalah 9,22%. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pandemi krisis global Covid-19 yang menyerang Indonesia sejak awal tahun 2020, sehingga mengakibatkan menurunnya aktifitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

Pemerintah terus berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menekan angka keluarga pra-sejahtera. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diturunkan

oleh pemerintah antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai; Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai; Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro dan peraturan lainnya.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai disalurkan dalam bentuk Sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, sumber karbohidrat, serta vitamin dan mineral. Berdasarkan [Pedoman Umum Program Sembako \(2021\)](#), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastera, bertransformasi menjadi BPNT pada tahun 2017 di 44 kota terpilih di seluruh Indonesia. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) melalui penggunaan kartu elektronik yang langsung diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga dapat digunakan untuk memperoleh pangan yang telah ditetapkan di e-Warong.

E-Warong atau Elektronik Warung Gotong Royong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Pada wilayah dengan mekanisme khusus, e-Warong adalah tempat penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dengan Bank Penyalur melalui pemetaan lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan jaringan telekomunikasi, serta jumlah dan sebaran KPM ([Rizkiyaningsih et al., 2021](#)).

E-Warong menjadi sarana masyarakat miskin dan rentan dalam mendapatkan bantuan pemerintah dengan kualitas dan mutu yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden yang menginginkan perbaikan program pemberian beras masyarakat miskin (*raskin*) pada tahun 2016. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial meluncurkan program e-Warong yang menjadi agen pembayaran keuangan sekaligus perpanjangan tangan dan perbankan serta penyedia bahan pangan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog bagi penerima manfaat program bantuan pangan ([Yusnita et al., 2017](#)). Sejak dijalkannya program e-Warong pada tahun 2016, telah terdapat berbagai hasil evaluasi dalam pelaksanaan e-Warong baik yang positif maupun negatif. [Afringgo et al. \(2021\)](#) dalam temuannya menyatakan bahwa efektifitas pelaksanaan e-Warong di Kota Pekanbaru cukup efektif dilihat dari aspek ketepatan waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, beberapa temuan seperti yang ditunjukkan oleh [Rahayu dan Zein \(2020\)](#) dan [Hanum dan Suryawati \(2021\)](#) menyatakan bahwa program

e-Warong masih belum berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, seperti: tidak adanya transparansi keuangan antara pengelola e-Warong, ketidaktegasan pengelola dalam menjalankan aturan e-Warong, kurang kesadaran anggota PKH terhadap tanggung jawab e-Warong, dan kurangnya pemahaman anggota PKH dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penggunaan mesin gesek. Adapun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan analisis evaluasi implementasi yang dibedah tidak hanya dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan (PKM), namun juga dilihat dari peran apa saja yang dimiliki e-Warong serta manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar e-Warong dan dibandingkan dengan kriteria e-Warong yang ditetapkan oleh kemensos RI.

Sebagaimana permasalahan kemiskinan yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, Provinsi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan, terutama sejak terjadinya krisis global yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun apakah covid yang terjadi pada tahun 2020 membuat angka kemiskinan juga meningkat? Berdasarkan data BPS (2021), per Desember 2020 angka kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,28% atau sebanyak 344,23 ribu orang berstatus miskin. BPS (2020) menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2020 berkurang jika dibandingkan angka kemiskinan pada tahun 2019 yaitu 6,42 %. Hal yang sama terjadi di daerah perkotaan, termasuk Kota Padang sebagai ibu kota provinsi, di mana angka kemiskinan juga menurun sebesar 4,40% dibandingkan kondisi pada Tahun 2019 sebesar 4,48%. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Padang berupaya dengan melakukan sinergi terhadap kebijakan dari pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam peraturan menteri mengenai BPNT, Kota Padang juga menjalankan program e-Warong sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Program e-Warong telah diresmikan oleh Menteri Sosial sejak tahun 2016 di Kota Padang. E-Warong diintegrasikan bersama BPNT kepada 11 kecamatan di Kota Padang dengan total 316 unit E-Warong di Kota Padang yang mulanya diharapkan dapat berkembang dan menjadi pusat layanan sembako masyarakat miskin dan rentan di Kota Padang. Akan tetapi, program e-Warong di Kota Padang belum memperlihatkan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi e-Warong di Kota pada penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan proses implementasi program e-Warong di Kota Padang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Padang pada bulan November 2021. Sumber data diperoleh dari data BPS, dinas sosial, Bank Penyalur BPNT (Bank BRI), dan wawancara bersama informan yang terdiri atas 11 pengelola e-Warong di Kota Padang. Sementara itu, jenis data dalam penelitian ini keseluruhannya merupakan data sekunder, berupa data mengenai jumlah e-Warong di Kota Padang, data angka kemiskinan di Kota Padang, kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan, dan berbagai literatur yang bersumber dari buku teks atau jurnal ilmiah yang mendukung penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditabulasi, dipetakan, dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, kemudian

menelaah dan menganalisisnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *E-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang*

Implementasi E-Warong dalam program pengentasan kemiskinan di kota Padang sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan strategi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Kementrian sosial juga telah menentukan kriteria dari e-Warong yang diharapkan dapat membantu dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain: (1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas, di wilayah operasionalnya; (2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan; (3) Menjual harga pangan sesuai harga pasar; (4) Memiliki jaringan informasi dan Kerjasama antar agen/toko dengan pamsok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM. (Berkelanjutan dalam menyediakan bahan pangan); (5) Dapat melayani KPM dan Non KPM; dan (6) Komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan disabilitas.

Data BPS menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan BPS (2021), persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Barat berturut-turut dari tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah 6,65%, 6,42%, dan 6,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran BPNT memiliki pengaruh yang signifikan dalam membantu masyarakat miskin di Sumatera Barat. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat tersebut, data BPS juga menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase penduduk miskin di Kota Padang. Persentase penduduk miskin di Kota Padang dari tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut adalah sebesar 4,70%, 4,48%, dan 4,40%. Keberhasilan penyaluran tersebut juga tidak lepas dari peran e-Warong yang telah mulai beroperasi dari tahun 2016.

Beberapa hal dapat menyebabkan angka kemiskinan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang dapat menurun, salah satu yang perlu diapresiasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan di Kota Padang.

Apabila difokuskan kepada kebijakan BPNT, tentu kebijakan ini juga mengambil andil yang cukup dalam penurunan angka kemiskinan tersebut, begitu juga peran serta e-Warong dalam melancarkan implementasi dari penyaluran BPNT ini.

E-Warong dalam menyalurkan bantuan ke KPM tidak terlepas kaitannya dengan bank yang ditunjuk pemerintah untuk menggunakan *tools* (EDC) bank dalam penyaluran BPNT. Untuk Sumatera Barat, terdapat beberapa Bank yang terkait dalam penyaluran di kabupaten/kota, adapun Bank Penyalur yang ditunjuk antara lain Bank BRI, BNI, dan Mandiri.

Berdasarkan data Bank Penyalur, Jumlah e-Warong yang ada di Kota Padang berjumlah 316 e-Warong penyalur BPNT, namun masih termasuk yang terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai dikarenakan wilayah Mentawai di bawah supervisi Kota Padang.

E-Warong penyalur BPNT telah menyalurkan bantuan berupa bahan pangan kepada KPM, berdasarkan data yang diperoleh: Khusus Kota Padang s.d penyaluran tahap 7 atau pada Bulan Agustus 2021, penyaluran BPNT di Kota Padang telah

tersalurkan kepada 31.376 KPM dengan nominal penyaluran Rp. 6.275.200.000, - jumlah KPM yang akan menerima manfaat ini akan bertambah sampai dengan akhir tahun 2021. Melihat jumlah masyarakat penerima bantuan dan dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di Kota Padang mencapai 42 ribu jiwa, maka hampir semua penduduk miskin di Kota Padang mendapatkan bantuan BPNT/sembako.

Jika dibandingkan jumlah e-Warong dengan jumlah KPM yang menerima BPNT, maka rata-rata satu e-Warong dapat melayani sampai dengan 100 KPM yang akan membeli bahan pangan di e-Warongnya. Berdasarkan fakta ini, maka dampak yang ditimbulkan oleh e-Warong dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan teori Lesler dan Steward dapat diklasifikasikan pada manfaat e-Warong untuk KPM, manfaat untuk e-Warong itu sendiri, dan manfaat e-Warong secara luas sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Manfaat e-Warong untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dikategorikan kepada penduduk miskin terbantu dalam pemenuhan pangannya seperti beras, ikan, telur, dan protein lainnya di mana setiap bulan diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000, - untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan kata lain, masyarakat miskin akan terpenuhi kebutuhan primernya untuk makan dan dapat menyisihkan pendapatannya untuk keperluan lain seperti usaha, tabungan, dan lainnya. Kedepannya, dengan asumsi pendapatan yang disisihkan tadi terus berkembang menjadi usaha dan tabungan yang lebih besar, maka KPM dapat beranjak dari kondisi mereka sekarang yang masih tergolong dalam masyarakat miskin.

Manfaat untuk e-Warong itu sendiri terkait dengan pemberdayaan pelaku e-Warong sebagai pelaku UMKM. Pemberdayaan UMKM tentu dapat dikaitkan dengan implementasi e-Warong dalam penyaluran BPNT. Dengan tambahan melayani 100 KPM yang membutuhkan beras, telur dan protein lainnya, tentu masyarakat pengelola e-Warong mendapatkan tambahan pendapatan dengan peningkatan kuantitas jual bahan sembako tersebut. Kepastian dan keberlangsungan penjualan akan membuat masyarakat pengelola e-Warong dapat meningkatkan kapasitas usahanya, di samping fee transaksi yang diberikan bank atas penggunaan alat/tools laku pandai/edc yang dititipkan kepada pengguna e-Warong. Dengan kata lain, pemberdayaan dan pemerataan ekonomi masyarakat di wilayah e-Warong berada juga dapat terwujud karena juga berimbas kepada distributor dan peternak/petani yang menyalurkan dan memproduksi barang bantuan tersebut.

Selanjutnya, meskipun e-Warong sebagai upaya pengentasan kemiskinan tidak secara langsung menurunkan kemiskinan, akan tetapi e-Warong dapat dikategorikan sebagai program pengentasan kemiskinan karena e-Warong berfungsi sebagai: (1) penyalur bantuan sembako kepada KPM. Hal ini membuat e-Warong berkontribusi karena mendekatkan bantuan tersebut kepada KPM. Masing-masing pengguna e-Warong ditunjuk untuk melayani KPM di wilayahnya masing-masing, sehingga e-Warong dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan selanjutnya KPM dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka lainnya; (2) pemerataan pendapatan di wilayah, di mana e-Warong tidak hanya membawa manfaat pada dirinya sendiri sebagai pelaku UMKM dan kepada KPM, akan tetapi juga berimbas pada petani telur, petani beras, penjual ikan/pemilik kolam, atau distributor bahan pangan yang bekerja sama dengan e-Warong. E-Warong

akan memasok telur dari petani telur, dan beras dari petani beras untuk memenuhi kebutuhan KPM di saat pencairan bantuan, hal ini membuat suatu ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya bertumpu pada e-Warong saja, namun didistribusikan juga pada *layer* produksi bahan pangan serta distributornya; dan (3) Agen Laku Pandai, sehingga e-Warong juga membiasakan diri KPM yang mungkin sebelumnya belum terbiasa untuk ber-bank menjadi paham untuk bisa melakukan transaksi dengan menggunakan sarana perbankan. E-Warong yang juga agen laku pandai juga bisa mereferalkan tabungan yang biaya administrasinya nol, sehingga KPM biasa membiasakan diri menabung dalam rangka peningkatan kapasitas KPM nantinya, selain itu KPM yang mempunyai usaha dapat direferalkan untuk mendapatkan pinjaman bank dengan bunga rendah (KUR) dalam rangka membantu usaha KPM.

Ketiga hal di atas dapat menggambarkan peranan e-Warong untuk mendorong upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota Padang sesuai dengan tugas evaluasi kebijakan oleh Lester dan Steward yaitu menggambarkan dampak dan peran dari kebijakan tersebut.

### *Evaluasi E-Warong dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang*

Dalam Pelaksanaan kebijakan BPNT, perlu dilakukan evaluasi pada peran e-Warong terutama dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Dalam evaluasi ini, sesuai dengan tugas evaluasi kebijakan menurut Lesler dan Steward yaitu membandingkan pelaksanaan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka penulis akan memfokuskan evaluasi tersebut pada pemenuhan 3 kriteria e-Warong sesuai dengan ketentuan/ karakteristik yang ditentukan oleh Kemensos, antara lain:

#### *Memiliki Kemampuan, Reputasi, Kredibilitas, dan Integritas di Wilayah Operasionalnya*

E-Warong di Kota Padang pada umumnya telah memiliki reputasi dan kredibilitas di wilayah operasionalnya. Berdasarkan penelusuran di media elektronik, sama sekali belum ditemukan permasalahan yang membawa e-Warong di kota Padang terjerat permasalahan terkait kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas. Dengan kata lain, sampai dengan saat ini kriteria pertama yang ditetapkan oleh Kemensos ini masih dipenuhi oleh e-Warong di Kota Padang.

#### *Memiliki Sumber Penghasilan Utama dari Kegiatan Usaha yang Sedang Berjalan*

Berdasarkan berita [CNBC Indonesia \(Mei 2021\)](#), terdapat e-Warong di beberapa wilayah di Indonesia yang dibereskan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia karena berpotensi menjadi usaha yang hanya dibuka saat pencairan BNPT. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah Kota Padang. Penulis belum dapat menyatakan bahwa terdapat satu atau beberapa e-Warong yang pada hari biasa tutup dan tidak melayani penjualan sembako seperti yang dipersyaratkan, akan tetapi dalam kasus ini, disarankan kepada dinas terkait untuk dapat melakukan monitoring berkala dan melibatkan orang yang tidak berkepentingan dalam monitoring tersebut. Adapun pihak terkait seperti pejabat kecamatan, lurah, pendamping bansos, Dinas Sosial kota/kabupaten dan bank penyalur. Agar dapat melihat netralitas petugas monitoring, monitoring yang dilakukan instansi terkait harus bebas dari orang-orang tersebut untuk menghindari benturan kepentingan. Perlu juga

ditambahkan bahwa e-Warong tidak diperbolehkan dibuka pada usaha milik pejabat terkait tadi, penyediaan bahan pangan juga dilarang diikutsertakan pejabat-pejabat terkait tadi. Oleh karena itu untuk evaluasi karakteristik kedua ini, penulis menyarankan untuk dibentuknya tim monitoring yang bebas kepentingan.

#### Menjual Harga Pangan sesuai Harga Pasar

Masih bersumber dari [CNBC Indonesia \(Mei 2021\)](#), Menteri Sosial Republik Indonesia juga geram melihat e-Warong di beberapa daerah yang menjual bahan pangan di atas harga pasar. KPM yang merupakan masyarakat miskin tidak punya pilihan dan harus membelanjakan bantuan tersebut di e-Warong yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kunjungan kebeberapa e-Warong di Kota Padang, ditemukan fakta bahwa e-Warong di Kota Padang selalu mengikuti harga pasar di daerah setempat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, rata-rata antara e-Warong satu dengan e-Warong lainnya tidak terlalu memiliki jarak yang sangat jauh dikarenakan berada di kota, sehingga KPM selalu mendapatkan info perbandingan harga antara e-Warong satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika e-Warong satu memainkan harga maka KPM akan langsung complain dan informasi tersebut juga akan cepat tersebar sehingga merusak citra e-Warong yang menaikkan harga; Kedua, masih intensnya pihak terkait seperti dinas sosial dan petugas bank terkait melakukan kunjungan untuk memastikan kelancaran proses penyaluran dan memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan; Ketiga, KPM di Kota Padang telah melek teknologi, sehingga harga pasaran pangan selalu mereka update, sehingga kesempatan e-Warong curang sangat kecil sekali; Dan keempat, kesadaran e-Warong sendiri, karena setelah menjadi e-Warong dan menjadi penyalur BPNT, maka ekonomi mereka juga terbantu, sehingga keinginan untuk curang tidak ada.

Berdasarkan evaluasi dari tiga karakteristik di atas, maka e-Warong di Kota Padang pada umumnya telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun untuk memastikan semua e-Warong dapat beroperasi setiap hari, perlu dilakukan monitoring berkala oleh pihak yang tidak terkait dengan jabatan-jabatan dalam penyaluran BPNT.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi program e-Warong sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Kota Padang berpengaruh pada kesuksesan penyaluran bahan pangan kepada KPM sehingga membantu KPM untuk dapat melakukan pengembangan usaha atau *saving* untuk bangkit dari kategori kemiskinan. Pengaruh tersebut terlihat pada manfaat yang diberikan kepada KPM, manfaat yang dirasakan e-Warong itu sendiri, serta manfaat dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam implementasinya di Kota Padang, belum ditemukan kasus yang membuat nama baik e-Warong menjadi buruk. Namun, dengan melihat fakta e-Warong yang telah beroperasi di Kota Padang, maka dapat disimpulkan sistem monitoring yang dilakukan oleh petugas, dinas terkait dan bank penyalur telah meminimalisir kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu dengan kuatnya sistem monitoring tersebut, maka penyelewengan kewajiban yang harus dilakukan e-Warong dapat diminimalisir.

Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan kualitas e-Warong di Kota Padang, maka Dinas terkait harus menunjuk pihak ketiga

yang tidak terkait dengan dinas sosial, pejabat struktural kota sampai kelurahan, bank penyalur, serta pendamping bansos untuk mengetahui e-Warong yang ada di Kota Padang benar-benar telah sesuai standar dan beroperasi sesuai ketentuan. Untuk hal ini, Tim Audit swasta merupakan rekomendasi yang penulis berikan pada jurnal ini.

Mengingat keterbatasan data dan fakta untuk dianalisis, maka jurnal ini bisa jadi tidak dapat menggambarkan secara spesifik satu persatu masalah di masing-masing e-Warong di kota Padang. Selanjutnya, penulis berharap jurnal ini dapat menjadi suatu hal yang memperkaya pengetahuan pembaca dan pihak terkait dalam evaluasi e-Warong dan peningkatan peran e-Warong dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

#### REFERENSI

- Afringgo, R., Nurmasari, & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*. 1 (1), 22-29.
- Arndt, C., Jones, S., & Tarp, F. (2015). Aid, growth, and development: Have we come full circle?. *Journal of Globalization and Development*. 1(2), 1-27.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>.
- Budi Winarno (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.
- CNBC Indonesia. Sederet Fakta E-Warong yang Disikat Risma from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210526072000-4-248427/sederet-fakta-e-Warong-yang-disikat-risma>
- Fadilla, A. (2017). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 6 (1), 38 - 47.
- Gustin. (2019). Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. 10 (2), 376-397.
- Hanum, A.F., & Suryawati, R. Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan Mojolaban). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*. 1 (2), 203 - 218.
- Hirano, Y., & Otsubo, S. (2014). Aid is good for the poor. Washington DC: World Bank. Policy Research Working Paper No. 6998.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kenali lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai. Sekretaris Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rcet=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4nKuTpb30AhUCTGwGHAS-Bs4QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fkemensos.go.id%2Fuploads%2Ftopics%2F15664651387355.pdf&usg=AOvVaw0P9ESkSLvD4ZCIFmPgkjd->
- Mahembe, E., & Odhiambo, N.M. (2019). Foreign aid and poverty reduction: A review of international literature. *Journal of Cogent Social Sciences*, 5 (1), 1-10. Doi: <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1625741>

- Pedoman Umum Program Sembako. (2021). Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Primayanti, L.P.H., Fasisaka, I., & Nugraha, A.S.W. (2017). Strategi Pemerintah Tiongkok dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Kelaparan yang Ekstrem Sebagai Target Pertama MDGS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1 (1), 1-15.
- Rahayu, & Zein, A.S. (2020). Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong Di Kecamatan Padangsidiempuan Tenggara. *Journal of Islamic Social Finance Management*. 1 (2), 271-279.
- Rizkiyaningsih, A.A., Sopanah, A. & Anggarani, D. (2021). Efektivitas Penerapan Brilink dalam Upaya Mendorong Financial Inclusion (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Makassar). *Prosiding Conferenc on Economic and Business Inoovation* ( pp 1-13). Malang, Indonesia.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*. 4 (1), 1-14.
- Suyanto, Bagong dan Karnaji. (2005). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: ketika pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin. Surabaya: Airlangga University Press.
- Swinton, S.M., Escobar, G., & Reardon, T. (2003). Poverty and Environment in Latin America: Concepts, Evidence and Policy Implications. *World Development Journal*. 31 (11), 1865-1872.
- United Nation. (2020). Sustainable Development Goals. Retrieved from <https://sdgs.un.org/>